

Analisis Kinerja Sistem BIPAFOUR dan SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan *User Acceptance* Di BPKAD Banyuwangi

Muhammad Saiful Anam¹, Addina Sabil As Shafa²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH. Achmad Siddiq Jember

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH. Achmad Siddiq Jember

12msanam@gmail.com, 2addinasabilashafa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja sistem BIPAFOUR dan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Banyuwangi berdasarkan *User Acceptance*, dengan menggunakan kerangka kerja *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat karyawan kunci yang mewakili divisi yang berbeda: Penganggaran, Manajemen Keuangan, Aset, dan Akuntansi. Temuan menunjukkan bahwa BIPAFOUR unggul dalam hal kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use/PEOU*) karena penyesuaian lokal dan dukungan operasional yang efisien, sementara SIPD menunjukkan kegunaan yang unggul (*Perceived Usefulness/PU*) dalam hal akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang terstruktur di tingkat nasional. Namun, penggunaan kedua sistem tersebut secara bersamaan menimbulkan tantangan, termasuk inkonsistensi data dan masalah integrasi teknis. Studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perbaikan mekanisme sinkronisasi data, dan pelatihan pengguna yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan integrasi sistem. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, *User Acceptance*.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi telah menjadi bagian integral dari transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Konsep *Society 5.0*, yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016, menekankan integrasi teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan *Big Data* untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memegang peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, terutama di sektor publik.

Menurut Romney dan Steinbart (2018) SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA terdiri dari enam komponen utama: pengguna, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan kontrol internal. Dalam era *Society 5.0*, di mana data menjadi kunci utama, SIA menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan diproses bersifat akurat, dapat diandalkan, dan digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016, BPKAD bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi BPKAD mencakup Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Aset, dan Bidang Akuntansi. Setiap bidang memiliki tugas spesifik, mulai dari penyusunan anggaran, pengelolaan kas, inventarisasi aset, hingga pelaporan keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD), yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya dalam satu sistem yang terhubung secara elektronik. Tujuan utama SIPD adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, sebelum adanya SIPD, BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan sistem custom yang disebut *Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application* (BIPAFOUR). Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi, mencakup perencanaan, akuntansi, dan pengelolaan aset. Meskipun SIPD telah diadopsi sebagai sistem utama sejak 2021, BIPAFOUR masih digunakan secara bersamaan dengan SIPD. Hal ini menimbulkan tantangan dalam integrasi data dan efisiensi operasional, karena pegawai harus beradaptasi dengan dua sistem yang berbeda.

Pengoperasian dua sistem secara paralel mengharuskan BPKAD untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data, serta memastikan bahwa kedua sistem dapat berfungsi secara efektif. Integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD menjadi kebutuhan strategis untuk memaksimalkan manfaat dari kedua sistem, baik dari segi peningkatan efisiensi proses maupun transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menilai efektivitas penggunaan kedua sistem, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan model yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. Faktor utama dalam TAM adalah Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*). Persepsi Kegunaan mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa suatu teknologi dapat membantu mereka menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, sementara Persepsi Kemudahan Penggunaan mengacu pada sejauh mana pengguna merasa teknologi tersebut mudah digunakan.

Dalam konteks SIPD dan BIPAFOUR, TAM digunakan untuk menilai sejauh mana kedua sistem ini diterima oleh pengguna di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Fokus pada Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan menjadi kunci untuk memahami apakah sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD juga perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan pengguna (*user requirements*) dan kemampuan sistem dalam mendukung operasional keuangan daerah.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Sistem BIPAFOUR dan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Melalui pendekatan TAM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan kedua sistem, serta memastikan bahwa integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD dapat berjalan dengan baik demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, Nasution dan Nurwani (2021) melihat bagaimana SIPD diimplementasikan di BPKAD Kota Medan. Meskipun masih terdapat sejumlah hambatan teknis dan non-teknis yang menghalangi optimalisasi sistem, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Studi ini menekankan betapa pentingnya pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD.

Dalam kajian berjudul “Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPAFOUR ke SIPD (Studi Kasus di BPKAD Kabupaten Banyuwangi),” Taufikurrahman dan Zuraidah (2024) menilai bahwa proses peralihan BIPAFOUR ke SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Temuan menunjukkan bahwa BPKAD belum sepenuhnya beralih ke SIPD karena keterbatasan teknologi, yaitukekakuan modul administrasi dalam SIPD. Studi ini juga menemukan bahwa beberapa operasi keuangan yang tidak dapat ditangani oleh SIPD masih ditangani oleh BIPAFOUR, sebuah sistem alternatif.

Penelitian milik Setiawan, Firdaus, dan Sari (2024) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada PT Sinar Niaga Sejahtera Jember,” meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi efisiensi sistem informasi akuntansi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dan pengalaman kerja tidak memiliki dampak yang nyata terhadap efektivitas sistem, namun pelatihan dan keterampilan individu memiliki dampak yang nyata. Penelitian ini menyoroti pentingnya kemampuan pengguna dan pelatihan dalam meningkatkan kemanjuran sistem informasi.

Minovski, Tocev, dan Malchev (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “New Paradigm in Accounting Information Systems - The Role of the Latest Information Technology Trends” membahas mengenai dampak dari teknologi terbaru seperti Big Data, Blockchain, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence terhadap sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menyoroti bahwa teknologi-teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, mulai dari aspek keamanan data hingga perlu adanya adaptasi bagi para pengguna.

Arif, Subagio, dan Shulthoni (2024) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi investasi syariah dalam penelitian mereka yang berjudul, "Perilaku Penggunaan Aplikasi Investasi Syariah Generasi Z di Kota Surabaya dalam Perspektif *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)." Temuan menunjukkan bahwa perilaku penggunaan aplikasi secara signifikan dipengaruhi oleh pengaruh sosial, ekspektasi kinerja, dan ekspektasi usaha. Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya elemen-elemen ini untuk meningkatkan penerimaan pengguna sistem informasi.

METODE

Tahapan Penelitian

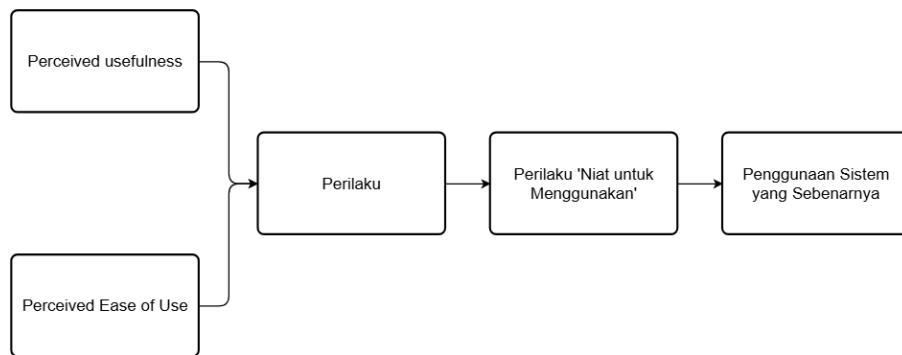
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, tim peneliti melakukan identifikasi masalah melalui wawancara dengan pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Rencana kegiatan meliputi wawancara mendalam dengan 4 orang pegawai yang mewakili empat bidang krusial. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan utama berupa wawancara semi-terstruktur dengan 4 orang pegawai BPKAD. Wawancara utama dilaksanakan dalam durasi 2 hari. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman tentang *user acceptance* terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD. Pada tahap pelaporan, seluruh kegiatan didokumentasikan melalui catatan lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, khususnya persepsi dan pengalaman pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan terstruktur bagaimana kedua sistem tersebut diimplementasikan, serta dampaknya terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan organisasional. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna sistem BIPAFOUR dan SIPD, yang mungkin tidak dapat diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan secara mendalam, tanpa melakukan generalisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem BIPAFOUR dan SIPD digunakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi.

Wawancara semi-terstruktur dipilih sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 4 orang pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Pegawai tersebut dipilih karena mereka mewakili bidang-bidang utama yang krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan, Bidang Aset, dan Bidang Akuntansi. Pemilihan informan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penerimaan pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD. Bapak Andika Permana Putra dari Bidang Anggaran, Ibu Ulfi Kurniati dari Bidang Pengelolaan, Ibu Ika Herdiana Friaresta dari Bidang Aset, dan Bapak Firman Hidayat dari Bidang Akuntansi dipilih sebagai informan karena mereka memiliki pengalaman dan otoritas yang signifikan dalam penggunaan kedua sistem tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai landasan teori utama. TAM dikembangkan oleh Fred Davis (1986) untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi baru. TAM terdiri dari dua variabel utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). *Perceived Usefulness* mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa suatu teknologi dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka atau mencapai tujuan mereka. Dalam konteks penelitian ini, PU digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem BIPAFOUR dan SIPD dianggap bermanfaat oleh pengguna dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, *Perceived Ease of Use* mengacu pada sejauh mana pengguna merasa bahwa suatu teknologi mudah digunakan. Dalam penelitian ini, PEOU digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem BIPAFOUR dan SIPD dianggap mudah digunakan oleh pengguna. Kedua variabel ini saling berkaitan dan memengaruhi user acceptance terhadap suatu teknologi. Semakin tinggi persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan dan manfaat suatu sistem, semakin tinggi pula kemungkinan sistem tersebut diterima dan digunakan secara efektif.



Gambar 1. Diagram TAM atas Perceived usefulness dan Perceived ease of use

Pengolahan Data

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan persepsi pengguna terhadap *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* atas sistem BIPAFOUR dan SIPD, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan kedua sistem tersebut. Selain itu, wawancara juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem tersebut memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan fokus pada persepsi pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD. Berikut adalah struktur pertanyaan yang digunakan:

1. Tugas & Tujuan Bidang
 - "Apa tugas dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu di bidang ini?"
 - "Bagaimana sistem BIPAFOUR dan SIPD mendukung tugas-tugas tersebut?"
2. Efisiensi
 - Fleksibilitas Akses: "Apakah sistem ini mudah diakses?"
 - Waktu: "Apakah sistem ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas?"
 - Kesulitan: "Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan sistem ini?"
3. Efektivitas
 - "Apakah sistem ini membantu Bapak/Ibu mencapai tujuan kerja dengan lebih baik?"
 - "Bagaimana sistem ini memengaruhi kualitas hasil kerja Bapak/Ibu?"
4. Akuntabilitas
 - Transparan: "Apakah sistem ini memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan?"
 - Keamanan Data: "Bagaimana sistem ini menjamin keamanan data keuangan daerah?"

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, interpretasi data, dan penyajian hasil analisis. Pertama, rekaman wawancara ditranskrip ke dalam bentuk teks untuk memudahkan analisis. Kedua, data yang telah ditranskrip dikodekan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian, seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ketiga, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, seperti kemudahan akses sistem, manfaat sistem dalam mendukung tugas, dan tantangan teknis dan non-teknis dalam penggunaan sistem. Keempat, data yang telah dikelompokkan diinterpretasikan untuk memahami makna dan konteksnya dengan merujuk pada kerangka TAM. Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian, termasuk bagaimana persepsi pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang	Indikator	Sistem Informasi Akuntansi	
		BIPAFOUR	SIPD
Anggaran	PEOU	(1) Mudah digunakan karena disesuaikan dengan kebutuhan lokal. (2) Respon cepat terhadap masalah teknis.	Sulit digunakan karena akses terbatas.

Bidang	Indikator	Sistem Informasi Akuntansi	
		BIPAFOUR	SIPD
Pengelolaan Keuangan	PU	Akses sistem yang cenderung lebih terbuka bagi pemilik user.	Akuntabilitas tinggi karena terintegrasi secara nasional.
	PEOU	Operasional sehari-hari lebih efisien karena sebelumnya merupakan sistem induk dan sudah ada jauh sebelum SIPD diterapkan.	Proses pengelolaan keuangan memakan waktu lebih lama karena trouble yang cenderung lama penyelesaiannya.
Aset	PU	Setiap pemilik user memiliki akses yang luas antar bidang dan kepentingan.	Akuntabilitas tinggi karena transparansi nasional.
	PEOU	Mudah digunakan untuk inventarisasi aset sehari-hari.	Proses inventarisasi aset memakan waktu lebih lama karena sistem rumit.
Akuntansi	PU	Setiap pemilik user memiliki akses yang luas antar bidang dan kepentingan.	Akuntabilitas tinggi karena integrasi nasional.
	PEOU	Mudah digunakan untuk pencatatan keuangan sehari-hari	Proses akuntansi memakan waktu lebih lama karena sistem rumit.
	PU	Setiap pemilik user memiliki akses yang luas antar bidang dan kepentingan.	Akuntabilitas tinggi karena terintegrasi secara nasional.

Tabel 1. Hasil Wawancara dari 4 Bidang Berdasarkan Aspek PEOU (Efisiensi) dan PU (Efektivitas & Akuntabilitas)

Aspek	Sistem Informasi Akuntansi	
	BIPAFOUR	SIPD
PEOU	(1) Mudah digunakan untuk operasional sehari-hari. (2) Respon cepat terhadap masalah teknis. (3) Dikembangkan sesuai kebutuhan lokal.	(1) Sulit digunakan karena sistem rumit dan akses terbatas. (2) Respon terhadap masalah teknis lambat.
PU	Setiap pemilik user memiliki akses yang luas antar bidang dan kepentingan.	(1) Sangat efektif untuk pelaporan yang terstruktur dan akurat. (2) Akuntabilitas tinggi karena terintegrasi secara nasional.

Tabel 2. Ringkasan Keunggulan dan Kekurangan BIPAFOUR dan SIPD Berdasarkan 4 Bidang

Kedua sistem, BIPAFOUR dan SIPD, saling melengkapi dalam pengoperasiannya di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. BIPAFOUR lebih unggul dalam hal kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use - PEOU*) dan efisiensi operasional sehari-hari. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Banyuwangi, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pegawai. Selain itu, respons terhadap masalah teknis juga lebih cepat karena tim IT yang menangani masih berada dalam lingkup kabupaten. Hal ini membuat BIPAFOUR sangat efektif untuk menangani tugas-tugas rutin dan operasional sehari-hari yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan akses.

Di sisi lain, SIPD lebih unggul dalam hal kegunaan (*Perceived Usefulness - PU*), terutama untuk pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Sebagai sistem yang dikembangkan secara nasional, SIPD memiliki standar yang lebih tinggi dalam hal akuntabilitas dan integrasi data keuangan. Sistem ini memungkinkan BPKAD untuk menghasilkan laporan keuangan yang terstruktur dan memenuhi standar nasional, sehingga sangat bermanfaat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun lebih rumit dalam hal penggunaan, SIPD memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pelaporan dan pengawasan keuangan.

Penggunaan kedua sistem secara bersamaan memungkinkan BPKAD untuk memaksimalkan keunggulan masing-masing sistem. BIPAFOUR digunakan untuk menangani operasional sehari-hari yang membutuhkan efisiensi dan kemudahan, sementara SIPD digunakan untuk pelaporan keuangan yang membutuhkan akurasi dan akuntabilitas tinggi. Kombinasi ini memastikan bahwa BPKAD dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif, baik dalam hal operasional maupun pelaporan.

Namun, penggunaan kedua sistem secara beriringan tentu juga menciptakan tantangan baru bagi BPKAD, terutama dalam hal integrasi data dan konsistensi informasi. Karena BIPAFOUR dan SIPD beroperasi secara terpisah, seringkali terjadi ketidaksesuaian data antara kedua sistem. Hal ini memerlukan upaya tambahan dari pegawai untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam kedua sistem tetap konsisten. Selain itu, perbedaan dalam struktur dan mekanisme operasional kedua sistem juga dapat menimbulkan kebingungan bagi pegawai, terutama yang belum terbiasa dengan kedua sistem tersebut..

KESIMPULAN

Penggunaan BIPAFOUR dan SIPD secara bersamaan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi BPKAD Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. BIPAFOUR, dengan keunggulannya dalam kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use* - PEOU) yang merujuk pada aspek efisiensi, memungkinkan pegawai untuk menjalankan operasional sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, SIPD, dengan keunggulannya dalam kegunaan (*Perceived Usefulness* - PU) yang merujuk pada aspek efektivitas dan akuntabilitas, memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan memenuhi standar nasional. Kombinasi ini memungkinkan BPKAD untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan.

Namun, untuk memaksimalkan potensi kedua sistem ini, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan integrasi data dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian data antara kedua sistem, yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam konteks Sistem Informasi Akuntansi (SIA), integrasi data yang baik merupakan kunci untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. SIA yang efektif harus mampu mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data keuangan secara terintegrasi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1) Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan SIPD adalah lambatnya respons terhadap masalah teknis. Karena SIPD dikelola oleh pemerintah pusat, masalah teknis yang muncul di tingkat daerah seringkali memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- Meningkatkan frekuensi komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, misalnya melalui rapat koordinasi rutin atau saluran komunikasi khusus untuk menangani masalah teknis.
- Mengembangkan sistem pelaporan masalah teknis yang lebih efisien, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan lebih cepat.

2) Mengembangkan Mekanisme Integrasi Data yang Lebih Baik

Untuk memastikan konsistensi informasi antara BIPAFOUR dan SIPD, diperlukan mekanisme integrasi data yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Mengembangkan sistem sinkronisasi data otomatis antara BIPAFOUR dan SIPD, sehingga data yang dimasukkan ke dalam salah satu sistem dapat secara otomatis tersinkronisasi dengan sistem lainnya. Hal ini akan mengurangi risiko ketidaksesuaian data dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh kedua sistem selalu konsisten.
- Menggunakan platform integrasi data yang dapat menghubungkan kedua sistem secara real-time, sehingga perubahan data di satu sistem dapat langsung tercermin di sistem lainnya.

Dengan mplementasikan rekomendasi yang telah diuraikan, seperti meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, mengembangkan mekanisme integrasi data yang lebih baik, serta melakukan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan, BPKAD dapat memastikan bahwa kedua sistem ini saling melengkapi dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, upaya ini juga akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Banyuwangi memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya *Honesty & Integrity, Transparency*, serta *Accountability*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. BPKAD Kabupaten Banyuwangi, khususnya para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan.
2. Dosen Pembimbing dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, atas bimbingan, masukan, serta dukungan akademis selama penelitian.
3. Rekan-rekan peneliti yang telah berkontribusi dalam diskusi dan pertukaran ide untuk penyempurnaan penelitian ini.
4. Keluarga dan sahabat atas motivasi, doa, serta dukungan moral yang tak ternilai selama proses penelitian.

Semoga kontribusi semua pihak dapat menjadi amal baik dan mendatangkan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, A.D., S.H., "Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah" Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 14 September 2023. <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/>
- Cabinet Office Home Page. "Society 5.0," n.d. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERBUP Kab. Gunungkidul No. 27 Tahun 2022," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216818/permendagri-no-27-tahun-2022>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 95 Tahun 2018," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/permendagri-no-95-tahun-2018>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 12 Tahun 2019," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/permendagri-no-12-tahun-2019>.
- Hakiki, Arista. "The Effect of Technological Advances to the Accounting Information System Performance." *European Journal of Business Management and Research* 8, no. 3 (June 7, 2023): 221–26. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.3.1988>.
- Hitachi-UTokyo. *Society 5.0: A People-centric Super-smart Society*. Springer Nature, 2020.
- John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2022).
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. *Intermediate Accounting, Volume 1*. Wiley, 2009.
- Masruroh, Nikmatul, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, and Kelvin Putra. "Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (January 17, 2024): 845–52. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.
- Masruroh, Nikmatul, None Ferdianto, None Nelly Septya Agus Salim, and None Nafiah Nur Andini. "Pengabdian Kolaboratif Dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*. 2, no. 3 (April 21, 2024): 673–82. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i3.372>.
- Masruroh, Nikmatul, Nur Hidayanti, Rizka Jannah Fauzia, and Nur Ismi Romadhoni. "Internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat." *Eastasouth Journal of Impactive Community Services* 2, no. 02 (March 30, 2024). <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v2i02>.
- Minovski, Zoran, Bojan Malchev, and Todor Tocev. "New Paradigm In Accounting Information Systems – The Role Of The Latest Information Technology Trends." *Economic and Business Trends Shaping the Future*, January 1, 2020. <https://doi.org/10.47063/ejimcs.2020.0004>.
- Moeneck, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.)
- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani MSi. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 9, no. 2 (August 9, 2021): 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>.
- Romney M. B., Steinbart P. J., "Accounting Information System: 14th Edition" (Italy: Pearson Education, 2018),

Setiawan, Akbar Dwi, Muhammad Firdaus, and Nurshadrina Kartika Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Sinar Niaga Sejahtera Jember." *Jakuma Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan* 5, no. 1 (May 20, 2024): 1–16. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1072>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, 2008.

Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep Pemahaman Secara Terpadu*. Bandung. Universitas Padjadjaran, 2019.

Taufikurrahman, Muhammad Aldhi, and Zuraidah1. "Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 Ke SIPD (Studi Kasus Di Bpkad Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial* Volume 18 Nomor 2 (2024). <https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.51962>.

Turner, Leslie, Andrea Weickgenannt, and Mary Kay Copeland. *Accounting Information Systems: Controls and Processes*. John Wiley & Sons, 2017.

Wicaksono, Soetam Rizky. *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>.